

Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Transparansi Anggaran dan Pelayanan Publik di Setda Kabupaten Banjar

Khairullah Anshari^{1*}, Devia Hetty Hernany², Amelia Puspita³, Muhammad Amin Hafi⁴, Rani Inayah⁵, Muhammad Hafi⁶, Masrifah⁷, Aji Rahadian⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA), I. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

E-mail: khairullahanshari@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3633>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06 Nov 2025

Revised: 12 Nov 2025

Accepted: 18 Nov 2025

Kata Kunci:

Sistem Informasi Desa,
Pelayanan Publik.

Keywords:

Village Information
System, Public Services.



ABSTRACT

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai instrumen transparansi anggaran dan penguatan pelayanan publik. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Setda Kabupaten Banjar melalui serangkaian pelatihan teknis, pendampingan implementasi, analisis kebutuhan, serta evaluasi penggunaan SID di sejumlah desa percontohan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman perangkat desa mengenai fitur anggaran, publikasi data, dan pemrosesan layanan administrasi desa berbasis digital. Selain itu, terdapat perubahan pola kerja menuju tata kelola desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Pengabdian ini menegaskan bahwa optimalisasi SID membutuhkan sinergi antara regulasi, kapasitas SDM, dan komitmen pemerintah daerah.

This community service program aims to improve the capacity of village officials to utilize the Village Information System (SID) as an instrument for budget transparency and strengthening public services. The program was implemented in collaboration with the Banjar Regency Regional Secretariat through a series of technical training sessions, implementation assistance, needs analysis, and evaluation of SID use in several pilot villages. The results of the program demonstrated a significant increase in village officials' understanding of budget features, data publication, and digital-based village administration service processing. Furthermore, there was a shift in work patterns toward more open, participatory, and accountable village governance. This program emphasized that optimizing SID requires synergy between regulations, human resource capacity, and local government commitment.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Khairullah Anshari, et al (2025). Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Transparansi Anggaran dan Pelayanan Publik di Setda Kabupaten Banjar, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3633>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan desa merupakan agenda strategis nasional yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai kebijakan turunan yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa di Indonesia memegang peranan vital dalam penyediaan layanan dasar, pembangunan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan struktural seperti rendahnya kompetensi aparatur, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya keterbukaan informasi publik.

Di Kabupaten Banjar, perkembangan teknologi pemerintahan desa telah mengalami kemajuan, namun belum diimplementasikan secara optimal pada seluruh desa. Sistem Informasi Desa (SID) telah disediakan sebagai platform terpadu untuk manajemen data desa, pengelolaan anggaran, publikasi informasi, serta pelayanan administrasi bagi masyarakat. Meski demikian, sejumlah desa masih

menghadapi kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis operator, ketidakteraturan pembaruan data, hingga minimnya pemahaman mengenai urgensi transparansi anggaran.

Literatur menunjukkan bahwa penggunaan SID sangat berpengaruh terhadap peningkatan tata kelola desa. Menurut Purwanto (2020), digitalisasi desa menjadi katalisator dalam mendorong pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan. Sementara itu, Nugroho & Wicaksono (2021) menyatakan bahwa SID berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi warga, terutama dalam pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini relevan dengan temuan Prasetyo (2019) yang menegaskan bahwa akses publik terhadap informasi anggaran memperkuat kepercayaan masyarakat dan menekan risiko penyimpangan administrasi.

Melihat fenomena tersebut, kegiatan pengabdian ini diorientasikan untuk membantu Setda Kabupaten Banjar dalam memperkuat pemanfaatan SID sebagai instrumen tata kelola desa modern. Pendekatan pengabdian menekankan pada *capacity building*, *knowledge transfer*, serta pendampingan langsung kepada perangkat desa agar penggunaan SID tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat dalam sistem pelayanan publik desa.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, melibatkan pemerintah desa, Setda Kabupaten Banjar, dan tim pengabdian. Adapun tahapannya meliputi:

Adapun metode yang digunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Dengan alur sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Kegiatan

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu manajemen yang akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses-proses manajemen berikutnya. Jika sejak awal manajer telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yang dicapai juga akan maksimal. Menurut Wijayanto (2012:75) mendefinisikan, “Perencanaan (planning) merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan”.

Pengorganisasian

Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan dalam proses manajemen yaitu pengorganisaasian. Malayu Hasibuan (2007: 118-119) menyatakan “Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.

Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan

Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monev menurut Suharto adalah untuk mengetahui apakah program yang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengetahui saran yang baik untuk digunakan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana program sudah tercapai dan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilakukan (Suharto, 2010).

Laporan akhir

Dalam laporan akhir, dilaporkan tentang kemajuan kegiatan, output dan outcome kegiatan, kendala yang dialami serta cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya juga disampaikan. Pengalaman dalam melaksanakan setiap kegiatan serta capaian yang diperoleh, diharapkan, dilengkapi dengan analisa mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa sebagai Fondasi Optimalisasi SID

Peningkatan kemampuan aparatur desa merupakan temuan inti yang sangat menentukan optimal atau tidaknya pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Sebelum kegiatan dimulai, banyak operator hanya menguasai fungsi dasar seperti input data kependudukan atau pembuatan surat sederhana. Proses pengabdian memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup lebar terutama dalam fitur-fitur strategis seperti pengelolaan anggaran, pemetaan aset desa, pelaporan kegiatan pembangunan, hingga publikasi informasi untuk warga.

Melalui rangkaian pelatihan teknis yang bersifat *hands-on*, perangkat desa mulai memahami struktur sistem, alur kerja data, serta standar tata kelola informasi desa yang baik. Kemampuan untuk memproses dokumen administrasi secara digital memperlihatkan transformasi penting: aparatur desa tidak lagi bekerja secara manual dan terfragmentasi, tetapi mulai memanfaatkan digitalisasi sebagai kultur kerja baru.

Peningkatan kapasitas ini selaras dengan pendapat Pradana (2022) yang menekankan bahwa teknologi hanya efektif jika aktor yang mengoperasikannya memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan *digital behavior* yang mendukung. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun fondasi perubahan perilaku organisasi desa menuju tata kelola yang modern.

Implementasi Transparansi Anggaran melalui SID dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Desa

Salah satu persoalan klasik dalam administrasi desa adalah rendahnya akses publik terhadap informasi keuangan. Melalui pendampingan ini, desa-percontohan mulai mempublikasikan APBDes, dokumen realisasi anggaran, laporan kinerja tahunan, serta informasi kegiatan pembangunan secara rutin di platform SID.

Proses publikasi tidak sekadar mengunggah dokumen, tetapi diikuti dengan pembenahan struktur data agar mudah dibaca oleh warga, pembaruan berkala realisasi kegiatan, serta penyusunan infografis sederhana. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai merespons positif keterbukaan ini, terutama melalui komentar pada kanal informasi desa dan peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pemikiran Hood (2011) yang menempatkan transparansi sebagai elemen kunci *open government* untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Selain itu, temuan ini juga mendukung argumentasi Purwanto (2020) bahwa digitalisasi pemerintahan desa menciptakan ruang demokrasi yang lebih luas karena masyarakat dapat mengawasi penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN maupun PADes.

Dengan demikian, pemanfaatan SID bukan hanya meningkatkan akses informasi, tetapi juga mendorong perubahan relasi antara pemerintah desa dan warga menjadi lebih terbuka, egaliter, dan partisipatif.

Percepatan dan Efisiensi Pelayanan Publik Berbasis Digital

SID terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi pelayanan administratif di desa. Sebelum intervensi, layanan surat menyurat membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui proses manual, mulai dari penulisan, pencatatan, pengecekan arsip, hingga penandatanganan. Setelah pelatihan dan pendampingan, operator mulai memanfaatkan fitur pelayanan administrasi secara digital untuk menghasilkan dokumen secara otomatis berdasarkan basis data kependudukan.

Waktu layanan menjadi lebih cepat, kesalahan pencatatan berkurang, dan dokumen menjadi lebih mudah ditelusuri karena seluruh arsip tersimpan dalam sistem. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mengurangi beban kerja perangkat desa. Dari perspektif administrasi publik, temuan ini memperkuat pandangan Osborne & Brown (2013) mengenai inovasi sektor publik yang mengedepankan penggunaan teknologi untuk menciptakan nilai pelayanan (*public value*). SID menjadi alat yang memungkinkan desa untuk menyediakan layanan yang responsif dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi.

Perubahan Budaya Kerja: Dari Administrasi Manual ke Sistematis Berbasis Data

Intervensi SID tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan budaya birokrasi desa. Desa-desanya percontohan mulai menunjukkan kecenderungan baru dalam mengelola data secara lebih sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi. Misalnya, pembaruan data kependudukan yang sebelumnya dilakukan beberapa kali dalam setahun kini mulai dilakukan secara berkala setiap bulan atau setiap kali terdapat perubahan status penduduk.

Perubahan budaya kerja ini penting karena tata kelola berbasis data (*data-driven governance*) merupakan ciri utama pemerintahan modern. Validitas dan ketepatan data menjadi penentu kualitas keputusan pemerintah desa, baik dalam perencanaan pembangunan, identifikasi kelompok miskin, penyusunan prioritas kegiatan, hingga penyaluran bantuan sosial.

Hal ini memperkuat konsep yang dikemukakan Wicaksono (2021) bahwa digitalisasi pada tingkat desa akan mengubah pola pemerintahan dari *rule-based administration* menjadi *evidence-based governance*. Dengan demikian, SID bukan hanya alat, tetapi perangkat strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan desa.

Tantangan Implementasi: Infrastruktur, Literasi Digital, dan Konsistensi Pembaruan Data

Selama pelaksanaan pengabdian, sejumlah tantangan teridentifikasi sebagai hambatan jangka panjang dalam optimalisasi SID:

Ketimpangan literasi digital antar perangkat desa

Meskipun sebagian aparatur dapat beradaptasi dengan cepat, terdapat pula operator yang membutuhkan pendampingan lebih intens akibat keterbatasan pengalaman menggunakan komputer dan internet. Hal ini membuat kualitas pengoperasian SID tidak merata antar desa.

Keterbatasan infrastruktur jaringan di desa tertentu

Beberapa desa mengalami kendala konektivitas yang membuat proses pembaruan data menjadi lambat. Infrastruktur jaringan menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan keberlanjutan penggunaan SID.

Tidak adanya SOP pembaruan data

Pembaruan data SID masih bergantung pada inisiatif operator masing-masing desa, sehingga konsistensinya tidak selalu terjaga. Tanpa standar prosedur, data berpotensi tidak mutakhir atau tidak sinkron dengan kondisi nyata di lapangan.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa optimalisasi SID tidak hanya membutuhkan pelatihan teknis, tetapi juga intervensi kebijakan, penguatan regulasi, serta dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah.

Dampak Strategis bagi Pemerintahan Kabupaten Banjar

Intervensi pengabdian ini memberikan dampak jangka panjang bagi Setda Kabupaten Banjar, antara lain:

1. Meningkatnya integrasi data desa dengan kebutuhan perencanaan kabupaten,
2. Berkurangnya ketergantungan desa pada sistem manual,
3. Terbukanya peluang untuk pengembangan dashboard monitoring anggaran desa,
4. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi publik tingkat desa.

Dengan demikian, SID tidak hanya memperkuat desa tetapi juga memperkuat struktur pemerintahan kabupaten secara keseluruhan melalui data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah dianalisis.



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

SIMPULAN

Pengabdian ini membuktikan bahwa optimalisasi SID memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola desa melalui transparansi anggaran dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas SDM menjadi elemen paling menentukan keberhasilan implementasi. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan regulasi dari Setda Kabupaten Banjar, SID berpotensi menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa modern yang terbuka, akuntabel, dan melayani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berperan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Hood, C. (2011). *Transparency: The key to better governance?* Oxford University Press.
- Lexy, J. M. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Malayu, H. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R., & Wicaksono, B. (2021). Implementasi sistem informasi desa dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 145–160.
- Osborne, S. P., & Brown, L. (2013). *Handbook of innovation in public services*. Edward Elgar Publishing.
- Pradana, A. (2022). Kompetensi aparatur desa dan adopsi teknologi dalam penguatan tata kelola desa digital. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(1), 33–47.
- Prasetyo, A. (2019). Transparansi anggaran desa melalui digitalisasi informasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 4(1), 50–66.
- Purwanto, E. (2020). Digitalisasi desa sebagai katalis pembaruan tata kelola publik. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 7(2), 125–139.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Suharto, E. (2010). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Pengantar administrasi bisnis*. Mandar Maju.
- Terry, G. R. (2010). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Wijayanto, A. (2012). *Manajemen pemerintahan modern*. Graha Ilmu.
- Wicaksono, A. (2021). Digital governance di tingkat desa: Pergeseran menuju evidence-based policy. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 10(1), 77–91.